

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN MELALUI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan** **Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**Tasudin**

**NPM 7223800004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

**Tasudin**

**NPM. 7223800004**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I,**Dr. Sanusi, S.H., M.H** NIDN. 0609086202 | Tegal, 15 Agustus 2024Pembimbing II,**Dr. Nuridin, S.H., M.H**NIDN. 0610116002 |
| Mengetahui,Direktur Pascasarjana,**Prof. Dr. Sitti Hartinah D.S., M.M.**NIP. 19541117 198103 2 002 |

# PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelligence*” karya:

Nama : Tasudin

NPM : 7223800004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari …………, tanggal …. …………… 2024.

 Tegal, Agustus 2024

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Tity Kusrina, M.Pd.**

NIDN. 0606066001NIDN. 0630086401

Penguji Utama,

**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.**

NIDN. 0617026101

Penguji I, Penguji II,

**Dr. Sanusi, S.H., M.H Dr. Nuridin, S.H., M.H**

NIDN. 0609086202 NIDN. 0610116002



 Mengetahui,

Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,

**Prof. Dr. Sitti Hartinah D.S., M.M. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIP. 19541117 198103 2 002 NIDN. 0609086202

# PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tasudin

NPM : 7223800004

Jenjang : S2/ Maagister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Kedudukan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelligence*” secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemui ada yang tidak sesuai, maka saya siap menanggung akibatnya.

 Tegal, 24 Juli 2024

 Yang menyatakan,



 **Tasudin**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kreativitas dan penciptaan karya. Kemampuan AI untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai artistik dan inovatif telah memunculkan pertanyaan krusial mengenai status hukum dari karya tersebut. Hal ini menimbulkan dilema dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang ada, khususnya hak cipta, yang secara tradisional didasarkan pada konsep kreativitas manusia. Ketidakjelasan mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai pencipta apakah pengembang AI, pengguna AI, atau AI itu sendiri - serta bagaimana perlindungan hukum seharusnya diterapkan pada karya yang dihasilkan oleh AI, menjadi isu yang mendesak untuk dikaji.

Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis kedudukan hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam konteks hak cipta, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan mendorong inovasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan kepustakaan, pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, sumber sekunder, analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum mengenai *Artificial Intelligence* masih berada dalam tahap awal dan belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif. Aspek hukum AI masih diatur secara parsial melalui berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai agen elektronik, dan Undang-Undang Paten sebagai hasil konvensi.

Dalam konteks karya cipta yang dihasilkan melalui AI kedudukan hukum AI belum dipandang sebagai subjek hukum selayaknya orang atau badan hukum. Undang-Undang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI. Definisi pencipta dalam Undang-Undang tersebut masih mengacu pada "seorang atau beberapa orang", yang mengimplikasikan keterlibatan manusia. Akibatnya, terdapat ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan, perlindungan, dan eksploitasi karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk pembaruan dan penyesuaian kerangka hukum di Indonesia guna mengakomodasi perkembangan teknologi AI dan implikasinya terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks hak cipta.

**Kata Kunci**: Artificial Intelegence, HAKI, Hak Cipta, Paten.

**ABSTRACT**

The development of artificial intelligence (AI) technology has brought significant changes in various aspects of life, including in the world of creativity and work creation. AI's ability to produce works that have artistic and innovative value has raised crucial questions regarding the legal status of these works. This poses a dilemma in the existing intellectual property legal system, particularly copyright, which is traditionally based on the concept of human creativity. The ambiguity over who should be considered a creator whether the AI developer, the AI user, or the AI itself - as well as how legal protections should be applied to AI-generated work, is an urgent issue to be examined.

The type of research used in this study is a type of library research with a normative research approach. The research data source uses secondary data sources, then analyzed by qualitative analysis by deductive thinking.

The results of the study show that the legal regulation regarding Artificial Intelligence is still in its early stages and does not yet have comprehensive special regulations. The legal aspect of AI is still partially regulated through various laws such as the Information and Electronic Transactions Act as an electronic agent, and the Patent Law as a result of conventions. In the context of copyrighted works produced through AI, the legal position of AI has not been seen as a legal subject like a person or legal entity.

The Copyright Law has not explicitly regulated works produced by AI. The definition of creator in the Act still refers to "one or several persons", which implies human involvement. As a result, there is legal uncertainty regarding the status of ownership, protection, and exploitation of AI-generated works. This raises an urgent need for updates and adjustments to the legal framework in Indonesia to accommodate the development of AI technology and its implications for intellectual property rights, especially in the context of copyright

**Keywords:** Artificial Intelligence, Intelectual Property, Copyright, Patent**.**

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tantangan hukum terbesar abad ini adalah mengatur entitas yang bisa belajar dan berevolusi sendiri."

(Tasudin)

"Di mana tidak ada hukum, di situ tidak ada kebebasan."

 (John Locke)

**Persembahan :**

* Kedua orang orang tua tercinta, Bapak (alm) Dusman dan Ibu (alm) Darniyah
* Istriku tercinta Dhiny Wiragustiana, S.Kep. dan ketiga anakku Febrian Dhita Wijaya, Haifan Juniar dhita Wijaya dan Mayza Viky Savana tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
* Sahabat-sahabatku seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam penulisan tesis ini.
* Almamater tercinta UPS Tegal.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah,* puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Radulullah Saw, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah menetapkan kami sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UPS Tegal.

2. Prof. Dr. Hj. Sitti Hartinah, DS, M.M.**,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kebijakan dan pelayanan akademik selama studi di Pascasarjana UPS Tegal.

3. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Unversitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bimbingan dan bantuan akademik kepada kami selama studi di Magister Ilmu Hukum.

5. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Sanusi, S.H., M.H, M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

6. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.

8. Serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

 Tegal, Agustus 2024

 Penulis

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii](#_Toc174000126)

[PENGESAHAN UJIAN TESIS iii](#_Toc174000127)

[PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv](#_Toc174000128)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii](#_Toc174000129)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc174000130)

[BAB I 3](#_Toc174000131)

[PENDAHULUAN 3](#_Toc174000132)

[A. Latar Belakang 3](#_Toc174000133)

[B. Rumusan Masalah 8](#_Toc174000134)

[C. Tujuan Penelitian 9](#_Toc174000135)

[D. Manfaat Penelitian 9](#_Toc174000136)

[E. Originalitas Penelitian 9](#_Toc174000137)

[F. Kerangka Konseptual 14](#_Toc174000138)

[G. Kerangka Teori 19](#_Toc174000139)

[H. Sistematika Penulisan 21](#_Toc174000140)

[BAB II 23](#_Toc174000141)

[TINJAUAN PUSTAKA 23](#_Toc174000142)

[A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual 23](#_Toc174000143)

[1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual 23](#_Toc174000144)

[2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia 25](#_Toc174000145)

[3. Perjanjian Internasional Tentang Hak Kekayaan Intelektual 27](#_Toc174000146)

[4. Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 29](#_Toc174000147)

[B. Tinjauan Umum Tentang Artificial Intelligence 32](#_Toc174000148)

[1. Definisi Hukum Artificial Intelligence 32](#_Toc174000149)

[2. Aspek Hukum Mengenai Artificial Intelligence 34](#_Toc174000150)

[3. Perkembangan Hukum *Artificial Intelligence* Secara Internasional 37](#_Toc174000151)

[4. Kasus Penyalahgunaan Artificial Intelligence 40](#_Toc174000152)

[C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum 43](#_Toc174000153)

[BAB III 47](#_Toc174000154)

[METODE PENELITIAN 47](#_Toc174000155)

[I. Jenis Penelitian 47](#_Toc174000156)

[J. Pendekatan Penelitian 47](#_Toc174000157)

[K. Sumber Data 49](#_Toc174000158)

[L. Teknik Pengumpulan Data 50](#_Toc174000159)

[M. Teknik Analisis Data 51](#_Toc174000160)

[BAB IV 53](#_Toc174000161)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53](#_Toc174000162)

[A. Pengaturan *Artificial Intelligence* Dalam Hukum Positif Di Indonesia 53](#_Toc174000163)

[B. Kedudukan Hukum Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelligence* 78](#_Toc174000164)

[BAB V 87](#_Toc174000165)

[PENUTUP 87](#_Toc174000166)

[A. Simpulan 87](#_Toc174000167)

[B. Saran 88](#_Toc174000168)

[DAFTAR PUSTAKA 89](#_Toc174000169)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kreativitas dan penciptaan karya intelektual. Kemampuan AI untuk menghasilkan karya cipta seperti tulisan, musik, seni visual, dan bahkan kode program telah membangkitkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan hukum dari karya-karya tersebut. Konsep hak cipta tradisional didasarkan pada prinsip bahwa karya cipta merupakan hasil kreativitas dan ekspresi individu manusia. Namun, dengan kemunculan AI yang dapat menghasilkan karya cipta secara otonom, muncul pertanyaan apakah karya-karya tersebut dapat dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi oleh hukum hak cipta.(Gede Ari Rama et al., 2023)

Di Indonesia, perkembangan teknologi AI dalam menghasilkan karya cipta intelektual masih tergolong baru. Namun, beberapa inisiatif telah dilakukan baik di kalangan akademisi, peneliti, maupun pengembang AI lokal. Salah satu contohnya adalah karya seni visual yang dihasilkan oleh AI seperti lukisan digital dan animasi. Beberapa seniman dan pengembang Indonesia telah mengeksplorasi penggunaan AI seperti website *DALL-E, Midjourney*, dan *Stable Diffusion* untuk menghasilkan karya seni visual yang menarik dan unik.(Akbar & Sarifudin, 2024)

Di bidang penulisan, ada beberapa upaya untuk mengembangkan AI yang dapat menghasilkan konten tulisan dalam bahasa Indonesia. Meski masih dalam tahap awal, beberapa peneliti dan pengembang di lembaga riset dan universitas di Indonesia tengah mengembangkan model AI untuk memproduksi tulisan seperti artikel, cerita pendek, dan puisi dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi produksi konten bahasa Indonesia secara lebih efisien dan menarik. Bahkan AI dapat menghasilkan karya yang dapat diakses melalui website Chat GPT, Co Pilot, dan banyak platfotm AI lainya yang dapat digunakan untuk menghasilkan karya tulis ilmiah(Čerka et al., 2017)

Selain itu, dalam bidang musik, ada juga upaya untuk mengembangkan AI yang dapat menghasilkan komposisi dan aransemen musik yang sesuai dengan budaya dan genre musik Indonesia. Peneliti dan musisi Indonesia tengah berkolaborasi untuk melatih model AI dengan data musik Indonesia, seperti gamelan, dangdut, dan lagu daerah. Meskipun masih dalam tahap eksperimental, hal ini dapat membuka peluang baru dalam penciptaan musik tradisional dan modern dengan bantuan AI. Musisi Indonesia yang memanfaatkan AI diantaranya Alfath Flemmo yang bahkan mendapatkan penghargaan dan beasiswa dari Sony Musik Indonesia pada tahun 2022.(Carter et al., 2020)

Dalam konteks pengembangan perangkat lunak dan aplikasi, beberapa perusahaan teknologi di Indonesia juga telah memanfaatkan AI untuk membantu proses pemrograman dan pengembangan produk. Misalnya, penggunaan AI seperti Copilot untuk membantu menyarankan baris kode yang relevan bagi programmer. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengembangan aplikasi dan sistem informasi di Indonesia. Meskipun masih dalam tahap awal, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan AI untuk menghasilkan karya cipta intelektual telah menjadi perhatian di Indonesia. Namun, perlu adanya kajian dan regulasi yang memadai untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya cipta melalui AI di Indonesia. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan teknologi AI dalam bidang kreativitas di tanah air.

Salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan adalah apakah AI dapat dianggap sebagai "pencipta" dalam konteks hukum hak cipta. Jika AI dianggap sebagai pencipta, maka karya cipta yang dihasilkan olehnya dapat dilindungi oleh hukum hak cipta, namun kepemilikan hak cipta tersebut menjadi pertanyaan lanjutan. Di sisi lain, jika AI tidak dianggap sebagai pencipta, maka karya cipta yang dihasilkannya mungkin tidak dapat dilindungi oleh hukum hak cipta. Hal ini dapat membuka peluang untuk eksploitasi dan penyalahgunaan karya cipta tersebut tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Isu lain yang perlu dipertimbangkan adalah peran manusia dalam proses penciptaan karya cipta melalui AI. Apakah keterlibatan manusia, seperti memasukkan data pelatihan atau memberikan instruksi kepada AI, cukup untuk menjadikan manusia sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula implikasi hukum terkait dengan penggunaan data pelatihan oleh AI dalam menghasilkan karya cipta. Apakah penggunaan data pelatihan yang berasal dari karya cipta yang dilindungi hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau tidak. Isu lain yang perlu dibahas adalah bagaimana menentukan originalitas dan kreativitas dalam karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Apakah kriteria originalitas dan kreativitas yang sama dengan karya cipta manusia dapat diterapkan pada karya cipta AI, atau dibutuhkan kriteria baru yang lebih sesuai dengan sifat unik dari AI.(van Assen et al., 2020)

Perlindungan hukum terhadap karya cipta AI juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Jika karya cipta AI tidak dilindungi, maka hal tersebut dapat menghambat investasi dan pengembangan teknologi AI dalam bidang kreativitas. Namun, di sisi lain, perlindungan yang terlalu ketat juga dapat membatasi akses dan pemanfaatan karya cipta tersebut oleh masyarakat luas. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula isu-isu etika dan moral yang terkait dengan penciptaan karya cipta melalui AI. Apakah terdapat batasan atau pedoman etis yang perlu diterapkan dalam penggunaan AI untuk menghasilkan karya cipta, terutama dalam kaitannya dengan potensi bias atau diskriminasi yang mungkin terjadi.(Cobbe & Singh, 2021)

Dalam konteks hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara spesifik mengatur mengenai kedudukan hukum karya cipta yang dihasilkan oleh AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berfokus pada konsep tradisional karya cipta yang dihasilkan oleh manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan penyesuaian regulasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI dalam bidang penciptaan karya intelektual. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak para pihak yang terlibat dalam proses penciptaan karya cipta melalui AI.(Martin & Freeland, 2021)

Dalam upaya menyusun regulasi yang tepat, perlu dilakukan analisis komparatif dengan negara-negara lain yang sudah memiliki pengaturan atau praktik terbaik terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta AI. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pembelajaran yang berharga bagi penyusunan regulasi di Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap potensi dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari pengaturan hukum terkait karya cipta AI. Hal ini untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang memadai, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam bidang teknologi AI di Indonesia. Dalam proses penyusunan regulasi, sangat penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi hukum, pengembang AI, pencipta karya intelektual, dan masyarakat umum. Hal ini untuk memastikan bahwa perspektif dan kepentingan berbagai pihak dapat diakomodasi secara seimbang dalam regulasi yang disusun.(Sari & Celik, 2021)

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan rezim hukum khusus untuk melindungi karya cipta AI, terpisah dari undang-undang hak cipta konvensional. Rezim hukum ini dapat menyesuaikan kriteria dan persyaratan yang lebih sesuai dengan sifat unik dari karya cipta AI. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah modifikasi undang-undang hak cipta yang ada untuk mengakomodasi perlindungan terhadap karya cipta AI. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas definisi "pencipta" atau mengatur mekanisme khusus untuk mengakui AI sebagai subjek hukum dalam konteks penciptaan karya intelektual.(Rosemann & Zhang, 2022)

Dalam proses pengaturan hukum terkait karya cipta AI, perlu juga dipertimbangkan mekanisme pendaftaran dan administrasi yang efisien untuk memfasilitasi perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut. Hal ini dapat mencakup pembentukan database atau registri khusus untuk karya cipta AI. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan pelanggaran hak cipta atas karya cipta AI. Hal ini dapat melibatkan pembentukan lembaga atau mekanisme khusus untuk menangani sengketa terkait karya cipta AI.(Lareyre et al., 2023) Berbagai problematika hukum diatas menjadi latar belakang yang menarik untuk dikaji terkait dengan “**Kedudukan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Melalui *Artificial Intelegence*”**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *artificial intelligence* di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum terkait karya cipta yang di hasilkan melalui *artificial intelligence*?

## Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis mengenai pengaturan hukum *artificial intelligence* di Indonesia.
2. Menganalisa kedudukan hukum terkait karya cipta yang di hasilkan melalui *artificial intelligence*

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkait kedudukan hukum *artificial intelegence*
2. Manfaat Praktis
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah sebagai pengelola dan penjamin perlindungan atas hak kekayaan intelektual di Indonesia
4. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam mengenali kedudukan hukum *artificial intelligence* dalam hukum di Indonesia

## Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan ini akan diketahui sisi-sisi yang membedakan dan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas “Kududukan Hukum Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan *Artificial Intelligence*”. Adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1. Originalitas Penelitian

| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muhammad Qolbi, Jefri, 2024,  Perlindungan Hukum Atas Digital Art Yang Dihasilkan Oleh *Generative Artificial Intelligence* (AI) Ditinjau Dari Hak Cipta. | Penelitian ini merujuk kepada pengaturan karya digital art yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence yang masih menjadi perdebatan panjang. Hal ini didasari bahwa apabila dikategorikan sebagai perlindungan hak cipta, maka Artificial Intelligence harus diinterprestasikan sebagai program komputer sehingga dapat diberikan perlindungan. Namun Sebagai program komputer Artificial Intelligence belum mendapatkan perlindungan yang spesifik pada saat ini. Karena kemampuan Artificial Intelligence untuk melakukan simulasi terhadap kecerdasaran manusia memiliki potensi persoalan hukum terkait pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga unsur kesalahan penggunaan Artificial Intelligence masih dapat dibebankan kepada manusia yang mengoperasikannya atau memiliki peran dalam pembuatannya. | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi pengaturan *artificial intelligence* dan kedudukan hukumnya terhadap kekayaan intelektual berupa karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelgence* |
| 2 | Moh Firnas Dini, 2023,  *Problematika Perlindungan Hak Cipta Yang Dihasilkan Artificial Intelligence Studi Perbandingan Konsep Hukum Indonesia Dengan United Kingdom.*  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan doktrin hukum di Indonesia dan United Kingdom dalam melihat Artificial Intelligence sebagai entitas yang menghasilkan karya dan diperlukan juga untuk mengetahui faktor apa saja yang perlu dikembangkan pada kerangka hukum hak cipta Artificial Intelligence di Indonesia | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi pengaturan *artificial intelligence* dan kedudukan hukumnya terhadap kekayaan intelektual berupa karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelgence* |
| 3 | Nadia Intan Rahmahafida, 2022, Analisis Problematika Lukisan Ciptaan *Artificial Intelligence* Menurut Undang-Undang Hak Cipta | Penelitian ini menunjukan bahwasanya *Artificial Intelligence* belum dapat dikategorikan sebagai pencipta suatu ciptaan karena bukan merupakan subjek hukum, serta penggunaan ciptaan untuk pemanfaatan *Artificial Intelligence* di bidang kreatif tetap harus menghormati dan menghargai karya cipta dengan memperoleh izin dari pencipta ciptaan tersebut. | Penelitian ini fokus untuk mengidentifikasi pengaturan *artificial intelligence* dan kedudukan hukumnya terhadap kekayaan intelektual berupa karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelgence* |

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti pada umumnya membahas tentang kajian hukum terhadap perkembangan *artificial intelligence* semata.Sedangkan penelitian ini, penulisakan fokus menganalisa terkait kedudukan hukum terhadap karya yang dihasilkan dari *artificial intelligence*.

## Kerangka Konseptual

**Kedudukan hukum** merujuk pada posisi atau status hukum yang dimiliki oleh suatu subjek atau objek hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Kedudukan hukum ini menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh subjek atau objek hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam konteks hukum, kedudukan hukum dapat dimiliki oleh individu (orang perorangan) maupun badan hukum (seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga). Kedudukan hukum ini memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi subjek hukum dalam melakukan tindakan atau aktivitas tertentu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Kedudukan hukum seseorang atau badan hukum dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti kelahiran (untuk individu), pendirian (untuk badan hukum), atau melalui proses hukum tertentu (seperti pengangkatan, naturalisasi, atau perubahan status hukum). Kedudukan hukum ini kemudian akan menentukan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, kedudukan hukum seseorang atau badan hukum dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki aset, atau bertindak sebagai pihak dalam sengketa hukum. Kedudukan hukum ini juga menentukan tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh subjek hukum tersebut. Di bidang hukum pidana, kedudukan hukum seseorang akan menentukan apakah mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Kedudukan hukum ini juga berkaitan dengan kemampuan untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan dan kemampuan untuk membela diri secara hukum. Dalam ranah hukum internasional, kedudukan hukum suatu negara atau organisasi internasional akan menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam hubungan internasional. Kedudukan hukum ini juga mempengaruhi kekebalan (imunitas) dan privilese yang dimiliki oleh subjek hukum internasional tersebut.

Kedudukan hukum juga dapat berubah seiring dengan perubahan status atau kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang awalnya memiliki kedudukan hukum sebagai anak di bawah umur, dapat berubah menjadi orang dewasa setelah mencapai usia tertentu dan memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Dalam beberapa kasus, kedudukan hukum dapat menjadi subjek perdebatan atau sengketa hukum. Misalnya, dalam kasus penciptaan karya intelektual oleh *Artificial Intelligence* (AI), terdapat pertanyaan mengenai kedudukan hukum AI dan karya cipta yang dihasilkannya dalam konteks hukum hak cipta. Oleh karena itu, penting bagi suatu sistem hukum untuk memiliki regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur kedudukan hukum dari subjek atau objek hukum yang ada. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat. Dalam perkembangan teknologi dan masyarakat yang dinamis, kedudukan hukum juga harus dapat disesuaikan dan diperbarui untuk mengakomodasi situasi dan kondisi baru yang muncul. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

**Hak cipta** di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang hak cipta sebelumnya dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi meliputi karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya, serta hak moral untuk dicantumkan namanya sebagai pencipta dan mempertahankan haknya terhadap ciptaannya. Masa berlaku perlindungan hak cipta di Indonesia adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan yang diperoleh pertama kali oleh badan hukum, masa berlakunya adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Undang-undang hak cipta Indonesia juga mengatur tentang lisensi atau izin yang dapat diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya. Lisensi ini dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif. Terdapat pengecualian terhadap hak cipta yang diatur dalam undang-undang, seperti penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, keamanan negara, dan lain-lain. Namun, penggunaan tersebut harus memenuhi batasan-batasan tertentu. Pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sedangkan sanksi perdata berupa ganti rugi. Untuk memudahkan pengelolaan dan penegakan hak cipta, undang-undang mengatur tentang pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertugas mengelola hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam rangka harmonisasi hukum hak cipta di tingkat internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Bern, Perjanjian Hak Cipta WIPO (WCT), dan Perjanjian Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (WPPT). Meskipun undang-undang hak cipta Indonesia sudah cukup komprehensif, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan perkembangan teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* (AI) yang dapat menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, pembaharuan atau penyesuaian regulasi mungkin diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

***Artificial Intelligence*** (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer cerdas, sehingga dapat meniru atau bahkan melebihi kecerdasan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. AI bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat memproses informasi, belajar dari data, dan mengambil keputusan secara cerdas layaknya manusia. Salah satu cabang utama AI adalah Machine Learning (ML), yang merupakan metode untuk memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dengan menggunakan algoritma ML, komputer dapat mengidentifikasi pola dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data pelatihan yang diberikan.

*Deep Learning* adalah subset dari *Machine Learning* yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam memproses data. *Deep Learning* menggunakan jaringan saraf tiruan (*neural networks*) dengan banyak lapisan tersembunyi untuk mengekstraksi dan mempelajari fitur dari data yang kompleks, seperti gambar, suara, atau teks. Salah satu aplikasi populer AI adalah *Natural Language Processing* (NLP), yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa alami manusia. NLP digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, penerjemahan mesin, dan analisis sentimen.

AI juga banyak diterapkan dalam bidang *Computer Vision*, yang melibatkan pemrosesan dan analisis data visual seperti gambar atau video. Aplikasi *Computer Vision* mencakup pengenalan objek, deteksi wajah, autonomous driving, dan banyak lagi. Dalam bidang robotika, AI digunakan untuk memungkinkan robot melakukan tugas-tugas yang kompleks, seperti navigasi, manipulasi objek, dan interaksi dengan lingkungan secara cerdas. AI membantu robot dalam pengambilan keputusan dan adaptasi terhadap situasi yang tidak terduga. AI juga memiliki peran penting dalam bidang kesehatan, seperti diagnosis penyakit, analisis gambar medis, dan penemuan obat baru. AI dapat membantu menganalisis data pasien secara cepat dan akurat, serta memberikan rekomendasi pengobatan atau terapi yang tepat.

Dalam dunia bisnis dan keuangan, AI dimanfaatkan untuk analisis data, prediksi pasar, deteksi penipuan, dan optimasi proses bisnis. AI dapat membantu mengambil keputusan yang lebih cerdas dan efisien berdasarkan data historis dan tren pasar. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, terdapat juga kekhawatiran dan tantangan yang perlu diperhatikan, seperti masalah etika, bias data, privasi, dan keamanan. Pengembangan AI yang bertanggung jawab dan transparan menjadi sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara manfaat dan risiko.

Secara keseluruhan, AI terus berkembang pesat dan berpotensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan manusia. Kolaborasi antara manusia dan AI yang cerdas dapat membuka peluang baru dalam memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Namun, diperlukan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI yang aman, etis, dan bertanggung jawab

## Kerangka Teori

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. **Teori hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum**.

**Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch**, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian tesis ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial

**BAB I** **PENDAHULUAN**. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, teori hukum, tinjauan konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**. Bab ini berisi tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang *Artificial Intelligence*, tinjauan umum tentang kedudukan hukum.

**BAB III METODE PENELITIAN**. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaturan mengenai *artificial intelligence* di Indonesia dan kedudukan hukum karya cipta yang dihasilkan melalui *artificial intelligence*.

**BAB V PENUTUP.** Penutup merupakan bagian terakhir dan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisikan saran-saran dari permasalahan.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

### Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas hasil kreativitas intelektual manusia. HKI melindungi berbagai bentuk karya seperti invensi, desain, merek dagang, karya sastra dan seni, serta rahasia dagang. Tujuan utama HKI adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada para pencipta. Dengan perlindungan HKI, pencipta dapat mengeksploitasi karya mereka secara komersial dan mencegah pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin.

HKI umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: hak cipta dan hak kekayaan industrial. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti tulisan, musik, film, dan seni. Sementara hak kekayaan industrial mencakup paten, merek dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Paten memberikan perlindungan untuk invensi baru yang memiliki langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, dan menjual invensi tersebut selama periode tertentu, biasanya 20 tahun.

Merek dagang melindungi tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dari pesaingnya. Ini dapat berupa kata, logo, simbol, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Perlindungan merek dagang dapat diperpanjang tanpa batas waktu selama masih digunakan secara komersial. Hak cipta melindungi ekspresi ide dalam bentuk karya kreatif. Perlindungan ini muncul secara otomatis saat karya diciptakan dan umumnya berlaku selama hidup pencipta ditambah beberapa dekade setelah kematiannya, tergantung pada hukum di masing-masing negara. Desain industri melindungi aspek ornamental atau estetika dari suatu produk. Ini mencakup bentuk, konfigurasi, pola, atau ornamen yang diterapkan pada produk melalui proses industri. Perlindungan desain industri biasanya berlaku untuk periode yang lebih singkat dibandingkan paten.

Penegakan HKI melibatkan berbagai mekanisme hukum, termasuk gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap pelanggaran. Sanksi dapat berupa denda, penyitaan barang-barang yang melanggar, dan dalam kasus-kasus serius, hukuman penjara. Meskipun HKI memberikan perlindungan yang kuat, ada beberapa pembatasan dan pengecualian untuk menyeimbangkan kepentingan pemegang hak dengan kepentingan publik. Misalnya, doktrin "*fair use*" dalam hak cipta memungkinkan penggunaan terbatas karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan seperti kritik, komentar, atau pendidikan. Di era digital, HKI menghadapi tantangan baru terkait perlindungan karya di internet dan platform digital. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan blockchain juga memunculkan pertanyaan baru tentang kepemilikan dan perlindungan kreasi yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan teknologi tersebut.

### Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasarkan pada beberapa undang-undang yang mengatur berbagai aspek HKI. Undang-undang ini mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Cipta di Indonesia melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan diberikan secara otomatis sejak karya diciptakan dan berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hak cipta juga mencakup hak moral yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Paten di Indonesia dibagi menjadi dua jenis: paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Perlindungannya berlaku selama 20 tahun. Paten sederhana diberikan untuk invensi baru yang pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada, dengan masa perlindungan 10 tahun.

Merek di Indonesia melindungi tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Desain Industri di Indonesia melindungi aspek estetika dari suatu produk. Perlindungan diberikan untuk desain yang baru dan berlaku selama 10 tahun. Pendaftaran desain industri memungkinkan pemegang hak untuk mencegah pihak lain membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor produk yang mengandung atau menerapkan desain tersebut.

Rahasia Dagang di Indonesia melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Tidak ada batas waktu perlindungan untuk rahasia dagang selama informasi tersebut tetap dirahasiakan. Indikasi Geografis di Indonesia melindungi tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang reputasi, kualitas, dan karakteristiknya terkait dengan faktor geografis. Perlindungan diberikan setelah didaftarkan dan berlaku selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan masih ada. Penegakan HKI di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur perdata dan pidana. Gugatan perdata dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sementara tindak pidana HKI dapat dilaporkan ke pihak kepolisian. Sanksi pidana bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional terkait HKI, termasuk Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Hal ini menjadikan Indonesia bagian dari sistem HKI global dan memberikan perlindungan HKI lintas batas. Meskipun kerangka hukum HKI di Indonesia cukup komprehensif, masih ada tantangan dalam implementasinya. Ini termasuk masalah penegakan hukum, kesadaran masyarakat tentang HKI, dan kebutuhan untuk terus memperbarui peraturan seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

### Perjanjian Internasional Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Perjanjian internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk menyeragamkan standar perlindungan HKI di seluruh dunia. Salah satu perjanjian paling penting adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industrial (1883). Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti perlakuan nasional dan hak prioritas untuk paten, merek dagang, dan desain industri. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886) adalah perjanjian utama yang mengatur hak cipta secara internasional. Konvensi ini menetapkan prinsip perlindungan otomatis tanpa formalitas dan perlindungan minimum selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah kematiannya.

Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) 1994, yang merupakan bagian dari Perjanjian WTO, adalah perjanjian komprehensif yang mencakup semua bidang HKI. TRIPS menetapkan standar minimum untuk perlindungan HKI dan mekanisme penegakan hukum yang harus diikuti oleh semua anggota WTO. Traktat Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty* - PCT) 1970 menyederhanakan proses pengajuan paten internasional. PCT memungkinkan pengajuan satu aplikasi paten internasional yang berlaku di banyak negara, mengurangi biaya dan kompleksitas mendapatkan perlindungan paten di berbagai negara.

Protokol Madrid (1989) terkait dengan Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Internasional Merek (1891), menyediakan sistem untuk pendaftaran merek dagang internasional. Sistem ini memungkinkan pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan di beberapa negara melalui satu aplikasi. Perjanjian WIPO tentang Hak Cipta (WCT) dan Perjanjian WIPO tentang Pertunjukan dan Fonogram (WPPT), keduanya disepakati pada tahun 1996, memperluas perlindungan hak cipta ke era digital. Perjanjian ini mencakup isu-isu seperti perlindungan program komputer, basis data, dan hak penyewaan.

Perjanjian Hukum Paten (Patent Law Treaty - PLT) 2000 bertujuan untuk menyelaraskan dan merampingkan prosedur formal terkait aplikasi paten nasional dan regional. PLT memudahkan proses mendapatkan dan mempertahankan paten di berbagai negara. Perjanjian Singapura tentang Hukum Merek (2006) memperluas cakupan Traktat Hukum Merek 1994, dengan memperbarui prosedur pendaftaran merek dagang internasional untuk mencakup perkembangan teknologi baru dalam pendaftaran dan manajemen merek.

Traktat Marrakesh (2013) bertujuan untuk memfasilitasi akses terhadap karya yang diterbitkan bagi orang-orang yang buta, memiliki gangguan penglihatan, atau memiliki keterbatasan dalam membaca cetakan. Traktat ini menciptakan pengecualian wajib terhadap hak cipta untuk kepentingan penyandang disabilitas. Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual (2012) memperluas perlindungan HKI untuk pemain dan penyanyi dalam pertunjukan audiovisual. Perjanjian ini memberikan hak eksklusif kepada pemain untuk mengizinkan reproduksi, distribusi, dan penyewaan rekaman pertunjukan mereka.

### Pengelolaan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melibatkan serangkaian strategi dan tindakan untuk mengoptimalkan nilai aset intelektual. Ini mencakup identifikasi, perlindungan, dan eksploitasi HKI. Pengelolaan yang efektif dimulai dengan audit HKI untuk mengidentifikasi aset yang dapat dilindungi, diikuti dengan keputusan strategis tentang cara terbaik untuk melindungi dan memanfaatkan aset tersebut.

Perlindungan hukum HKI umumnya dimulai dengan pendaftaran. Untuk hak cipta, perlindungan muncul secara otomatis saat karya diciptakan, namun pendaftaran dapat memberikan bukti kepemilikan yang kuat. Paten, merek dagang, dan desain industri biasanya memerlukan pendaftaran formal ke badan HKI nasional atau regional yang relevan. Setelah mendapatkan perlindungan, pemilik HKI harus aktif dalam memonitor penggunaan tidak sah atas kekayaan intelektual mereka. Ini dapat melibatkan penggunaan layanan pemantauan pasar, internet, dan bahkan investigasi pribadi. Ketika pelanggaran terdeteksi, pemilik HKI memiliki beberapa pilihan penegakan hukum.

Penegakan hukum HKI dapat dilakukan melalui jalur perdata atau pidana. Dalam kasus perdata, pemilik HKI dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran, meminta ganti rugi, dan/atau perintah pengadilan untuk menghentikan pelanggaran. Kasus pidana biasanya melibatkan pelanggaran yang lebih serius dan dapat mengakibatkan denda atau hukuman penjara bagi pelanggar. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase sering digunakan dalam sengketa HKI. Metode ini dapat menawarkan resolusi yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi formal. Banyak kontrak HKI sekarang memasukkan klausul yang mengharuskan pihak-pihak untuk mencoba metode alternatif ini sebelum mengajukan gugatan.

Lisensi adalah alat penting dalam pengelolaan HKI. Melalui lisensi, pemilik HKI dapat mengizinkan pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual mereka dengan syarat dan kondisi tertentu. Ini dapat menjadi sumber pendapatan signifikan dan cara untuk memperluas penggunaan HKI tanpa kehilangan kendali atasnya. Dalam konteks internasional, perlindungan HKI dapat menjadi lebih kompleks. Pemilik HKI perlu mempertimbangkan pendaftaran di berbagai yurisdiksi di mana mereka beroperasi atau berencana untuk beroperasi. Perjanjian internasional seperti PCT untuk paten dan Sistem Madrid untuk merek dagang dapat memfasilitasi proses ini.

Perlindungan HKI juga melibatkan langkah-langkah internal dalam organisasi. Ini termasuk kebijakan kerahasiaan, perjanjian non-disclosure dengan karyawan dan mitra bisnis, serta prosedur untuk mengelola dan melindungi informasi rahasia perusahaan. Dalam era digital, perlindungan HKI menghadapi tantangan baru. Pemilik HKI perlu mengembangkan strategi untuk melindungi karya digital mereka dari pembajakan dan penggunaan tidak sah di internet. Ini dapat melibatkan penggunaan teknologi seperti digital rights management (DRM) dan *watermarking*, serta pemantauan aktif atas platform online.

Pada akhirnya edukasi dan kesadaran publik adalah aspek penting dari perlindungan HKI. Banyak pelanggaran HKI terjadi karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman publik tentang HKI dan pentingnya menghormati hak-hak ini adalah bagian integral dari strategi perlindungan HKI yang komprehensif.

## Tinjauan Umum Tentang Artificial Intelligence

### Definisi Hukum Artificial Intelligence

Hukum Artificial Intelligence (AI) adalah cabang hukum yang relatif baru dan terus berkembang, yang berfokus pada regulasi, implikasi etis, dan tantangan hukum yang muncul dari pengembangan dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Definisi ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan AI, mulai dari pengembangan dan penerapannya hingga dampaknya terhadap masyarakat dan individu.

Salah satu aspek utama dari hukum AI adalah pengaturan mengenai tanggung jawab hukum. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang bertanggung jawab ketika sistem AI membuat keputusan yang merugikan atau menyebabkan kerusakan. Apakah itu pengembang, pengguna, atau bahkan sistem AI itu sendiri? Hukum AI berusaha untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi tanggung jawab ini dalam berbagai konteks, dari kendaraan otonom hingga sistem pengambilan keputusan medis.

Privasi dan perlindungan data juga merupakan komponen penting dalam definisi hukum AI. Dengan kemampuan AI untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam skala besar, muncul kebutuhan untuk regulasi yang melindungi privasi individu dan menjamin keamanan data. Hukum AI mencakup aturan-aturan tentang bagaimana data dapat dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh sistem AI.

Aspek lain yang signifikan dalam definisi hukum AI adalah regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas algoritma. Ini berkaitan dengan hak individu untuk memahami bagaimana keputusan yang mempengaruhi mereka dibuat oleh sistem AI. Hukum AI berusaha untuk menetapkan standar tentang sejauh mana algoritma AI harus dapat dijelaskan dan diaudit. Hukum AI juga mencakup isu-isu seputar hak kekayaan intelektual. Ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, atau bagaimana paten harus diterapkan pada penemuan yang dibuat oleh sistem AI. Definisi hukum AI mencakup upaya untuk mengadaptasi hukum kekayaan intelektual yang ada agar sesuai dengan realitas teknologi AI.

Etika AI adalah komponen integral dari definisi hukum AI. Ini melibatkan pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip etis dalam desain, pengembangan, dan penggunaan sistem AI. Hukum AI berusaha untuk mengkodifikasikan prinsip-prinsip etis ini ke dalam kerangka hukum yang dapat ditegakkan. Regulasi mengenai penggunaan AI dalam konteks tertentu juga merupakan bagian dari definisi hukum AI. Ini mencakup aturan khusus untuk penggunaan AI dalam sektor-sektor seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, dan penegakan hukum. Hukum AI berusaha untuk menyeimbangkan manfaat potensial dari teknologi AI dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik dalam setiap sektor.

Hukum AI juga mencakup aspek keamanan nasional dan internasional. Ini melibatkan regulasi mengenai penggunaan AI dalam konteks militer, serta upaya untuk mencegah penyalahgunaan teknologi AI untuk tujuan yang membahayakan keamanan global. Definisi hukum AI mencakup pembentukan norma-norma internasional terkait pengembangan dan penggunaan AI. Aspek penting lainnya dalam definisi hukum AI adalah pengaturan mengenai non-diskriminasi dan keadilan. Ini berkaitan dengan upaya untuk mencegah bias dan diskriminasi dalam sistem AI, serta memastikan bahwa penggunaan AI tidak memperdalam ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Hukum AI berusaha untuk menetapkan standar dan mekanisme untuk mendeteksi dan mengatasi bias dalam sistem AI.

Definisi hukum AI juga mencakup aspek dinamis dan adaptif. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi AI, hukum AI harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap inovasi baru. Ini melibatkan pengembangan mekanisme regulasi yang dapat merespon dengan cepat terhadap tantangan hukum baru yang muncul dari kemajuan teknologi AI, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamental hukum dan etika.

### Aspek Hukum Mengenai Artificial Intelligence

Tanggung Jawab Hukum Salah satu aspek hukum utama dalam AI adalah penentuan tanggung jawab ketika sistem AI menyebabkan kerugian atau kerusakan. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang bertanggung jawab - pengembang, pengguna, atau bahkan sistem AI itu sendiri. Hukum perlu mengembangkan kerangka yang jelas untuk mengatribusikan tanggung jawab dalam berbagai skenario, seperti kecelakaan yang melibatkan kendaraan otonom atau kesalahan diagnosis medis oleh sistem AI.

Privasi dan Perlindungan Data AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memproses data dalam skala besar, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang privasi. Aspek hukum AI harus menangani masalah seperti bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh sistem AI. Ini melibatkan penerapan dan adaptasi undang-undang perlindungan data yang ada, seperti GDPR di Eropa, untuk mengakomodasi tantangan khusus yang ditimbulkan oleh AI.

Hak Kekayaan Intelektual AI menantang konsep tradisional hak kekayaan intelektual. Pertanyaan muncul tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI, atau bagaimana paten harus diterapkan pada penemuan yang dibuat oleh sistem AI. Hukum perlu beradaptasi untuk menentukan apakah AI dapat dianggap sebagai "pencipta" atau "penemu" dalam konteks hukum, dan bagaimana hak-hak ini harus dialokasikan.

Transparansi dan Akuntabilitas Sistem AI sering kali beroperasi sebagai "kotak hitam", membuat keputusan yang sulit dijelaskan. Aspek hukum AI harus menangani masalah transparansi algoritma dan hak individu untuk mendapatkan penjelasan tentang keputusan yang mempengaruhi mereka. Ini mungkin melibatkan pengembangan standar hukum untuk "AI yang dapat dijelaskan" dan mekanisme untuk mengaudit sistem AI.

Diskriminasi dan Keadilan: AI dapat mewarisi atau bahkan memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan mereka. Aspek hukum AI harus menangani masalah diskriminasi algoritmik, memastikan bahwa sistem AI tidak melanggar undang-undang anti-diskriminasi yang ada. Ini mungkin melibatkan pengembangan tes hukum baru untuk mendeteksi dan mengurangi bias dalam sistem AI.

Keamanan dan Pertahanan: Penggunaan AI dalam konteks militer dan keamanan nasional menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Aspek hukum AI harus menangani masalah seperti penggunaan senjata otonom, tanggung jawab atas keputusan militer yang dibuat oleh AI, dan implikasi AI untuk hukum perang internasional. Regulasi Sektoral: Berbagai sektor, seperti keuangan, kesehatan, dan transportasi, menghadapi tantangan hukum khusus terkait penggunaan AI. Aspek hukum AI harus menangani bagaimana teknologi ini diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi yang ada untuk setiap sektor, memastikan bahwa manfaat AI dapat direalisasikan sambil meminimalkan risiko.

Etika AI: Meskipun etika dan hukum adalah domain yang berbeda, ada tumpang tindih yang signifikan dalam konteks AI. Aspek hukum AI harus menangani bagaimana prinsip-prinsip etis dapat dikodifikasikan ke dalam hukum, dan bagaimana kerangka etika AI yang ada (seperti pedoman etika AI dari Uni Eropa) dapat diterjemahkan ke dalam kewajiban hukum yang dapat ditegakkan. Perlindungan Konsumen: Dengan meningkatnya penggunaan AI dalam produk dan layanan konsumen, aspek hukum AI harus menangani masalah seperti keamanan produk, informasi konsumen yang memadai tentang kemampuan dan keterbatasan sistem AI, dan perlindungan terhadap praktik yang tidak adil atau menyesatkan yang melibatkan AI.

Tata Kelola Global AI: Mengingat sifat lintas batas dari teknologi AI, aspek hukum AI juga harus menangani masalah koordinasi internasional dan harmonisasi hukum. Ini mungkin melibatkan pengembangan perjanjian internasional tentang standar AI, kerja sama dalam penegakan hukum lintas batas terkait kejahatan yang melibatkan AI, dan upaya untuk mengatasi kesenjangan digital global dalam akses dan pengembangan AI.

### Perkembangan Hukum *Artificial Intelligence* Secara Internasional

Perkembangan hukum terkait Artificial Intelligence (AI) di tingkat internasional merupakan topik yang kompleks dan dinamis, mengingat cepatnya kemajuan teknologi serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. AI, yang mencakup sistem dan teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami, telah menuntut pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan dan regulasi yang dapat mengatasi tantangan yang muncul. Pertama-tama, perkembangan hukum AI internasional seringkali dimulai dari tingkat regional. Uni Eropa, sebagai salah satu pelopor dalam regulasi AI, telah mengajukan Proposal Regulasi AI yang dikenal sebagai AI Act. Proposal ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mengatur penggunaan AI berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan. Misalnya, aplikasi AI yang sangat berisiko, seperti dalam sektor kesehatan atau transportasi, akan menghadapi aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan aplikasi dengan risiko rendah.

Di Amerika Serikat, pendekatannya lebih terfragmentasi dan berbasis pada regulasi sektor spesifik. Meskipun belum ada undang-undang nasional yang komprehensif tentang AI, berbagai inisiatif dan pedoman telah diperkenalkan. Misalnya, *National AI Initiative Act* yang bertujuan untuk memajukan penelitian dan pengembangan AI, serta pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan seperti *Federal Trade Commission* (FTC) mengenai transparansi dan etika dalam penggunaan AI.

Di Asia, negara-negara seperti China dan Jepang juga telah mengembangkan kerangka hukum untuk mengatur AI. China, dengan strategi nasionalnya yang ambisius, telah menerbitkan berbagai dokumen dan pedoman yang mendukung pengembangan dan penerapan AI yang aman dan etis. Sementara itu, Jepang lebih fokus pada integrasi AI dalam masyarakat dengan pedoman yang menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin serta perlindungan data pribadi.

Pada tingkat internasional, terdapat upaya untuk menciptakan standar global yang dapat diterima secara luas. Organisasi seperti *International Organization for Standardization* (ISO) dan *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) telah mengembangkan standar dan pedoman untuk AI yang berfokus pada keamanan, etika, dan interoperabilitas. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat diadopsi oleh berbagai negara untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab.

Salah satu tantangan utama dalam mengembangkan hukum AI adalah isu privasi dan perlindungan data. Dengan kemampuan AI untuk mengolah data dalam jumlah besar, terdapat kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Regulasi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa memberikan panduan tentang bagaimana data harus dikelola dan melindungi hak-hak individu, yang berpotensi menjadi model untuk hukum AI di negara lain.

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa regulasi AI tidak menghambat inovasi. Pembuat kebijakan harus menyeimbangkan antara melindungi masyarakat dari potensi risiko AI dan mendukung perkembangan teknologi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pendekatan berbasis risiko, seperti yang diusulkan dalam AI Act oleh Uni Eropa, bertujuan untuk menangani hal ini dengan cara yang terukur.

Aspek etika juga merupakan bagian penting dalam perkembangan hukum AI. Banyak negara dan organisasi internasional saat ini sedang memikirkan prinsip-prinsip etika untuk memastikan bahwa AI dikembangkan dan digunakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Misalnya, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi sering kali menjadi fokus dalam pembahasan etika AI. Di samping itu, ada perhatian tentang dampak AI terhadap pekerjaan dan ekonomi. Automatisasi yang didorong oleh AI dapat mengubah pasar kerja secara signifikan, dan regulasi perlu mempertimbangkan bagaimana melindungi tenaga kerja yang mungkin terpengaruh. Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi kebijakan yang mendukung pelatihan ulang dan pengembangan keterampilan untuk membantu pekerja beradaptasi dengan perubahan ini.

Akhirnya, kerangka hukum untuk AI di masa depan mungkin akan memerlukan adaptasi yang berkelanjutan seiring dengan perkembangan teknologi. Mengingat AI adalah area yang sangat inovatif dan berkembang pesat, hukum dan regulasi harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan teknologi. Kolaborasi internasional akan menjadi kunci untuk menciptakan kerangka hukum yang efektif dan relevan di era digital ini.

### Kasus Penyalahgunaan Artificial Intelligence

Penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menjadi isu global yang kompleks dan menimbulkan berbagai implikasi hukum. Dalam konteks ini, hukum harus mampu mengejar perkembangan teknologi untuk mengatasi berbagai potensi penyalahgunaan. Privasi dan Perlindungan Data Salah satu area utama yang terpengaruh oleh penyalahgunaan AI adalah privasi dan perlindungan data. AI memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data dalam jumlah besar. Penggunaan yang tidak sah atau tidak etis dari data ini dapat melanggar hak privasi individu. Regulasi seperti GDPR di Eropa telah menetapkan standar ketat untuk perlindungan data, namun tantangan tetap ada dalam penerapannya secara global.

Keamanan Siber AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan serangan siber, seperti penciptaan malware cerdas yang dapat belajar dan berkembang untuk menghindari deteksi. Kasus-kasus seperti ini menuntut hukum untuk memperkuat kerangka kerja keamanan siber dan memastikan bahwa ada tindakan pencegahan yang efektif serta hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan siber yang menggunakan AI. Etika dan Tanggung Jawab Penyalahgunaan AI sering kali menimbulkan dilema etika. Misalnya, penggunaan AI dalam pengambilan keputusan otomatis dapat berdampak pada hak asasi manusia, seperti diskriminasi algoritmik yang dapat merugikan kelompok minoritas. Hukum harus memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem AI, serta menetapkan standar etika yang jelas.

Hak Kekayaan Intelektual AI dapat menciptakan karya-karya baru yang menimbulkan pertanyaan tentang hak kekayaan intelektual. Siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI? Apakah pencipta AI atau AI itu sendiri? Hukum harus mengembangkan kerangka kerja baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Penggunaan dalam Kriminalitas AI juga dapat disalahgunakan dalam kegiatan kriminal, seperti pembuatan deepfake yang digunakan untuk penipuan atau pemerasan. Hukum perlu mengklasifikasikan tindakan-tindakan ini sebagai kejahatan dan menetapkan hukuman yang jelas untuk mencegah dan menghukum pelaku.

Regulasi dan Kepatuhan Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait dengan penggunaan AI. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan kerangka regulasi yang harmonis secara internasional untuk mengatasi penyalahgunaan AI. Organisasi internasional perlu bekerja sama untuk menetapkan standar dan pedoman yang dapat diterima secara global. Hak Pekerja dan Pengangguran AI yang disalahgunakan dalam otomatisasi dapat mengakibatkan pengangguran massal, mengancam hak-hak pekerja. Hukum perlu melindungi pekerja dengan memastikan bahwa transisi menuju otomatisasi dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, serta menyediakan pelatihan ulang dan peluang pekerjaan baru.

Kesehatan dan Keselamatan Penggunaan AI dalam sektor kesehatan juga dapat disalahgunakan, seperti kesalahan diagnosis yang disebabkan oleh algoritma yang tidak tepat. Hukum harus memastikan bahwa penggunaan AI dalam kesehatan tunduk pada standar yang ketat untuk melindungi pasien dan menjaga keselamatan. Pengawasan dan Penegakan Hukum Efektifitas hukum dalam menangani penyalahgunaan AI bergantung pada kemampuan penegakan hukum untuk mengawasi dan mengadili kasus-kasus tersebut. Ini memerlukan pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum untuk memahami teknologi AI dan implikasi hukumnya.

Inovasi dan Perkembangan Teknologi Terlepas dari tantangan yang ada, hukum juga harus memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak menghambat inovasi. Ada kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap penyalahgunaan dan dorongan untuk pengembangan teknologi yang dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat. Dengan demikian, penanganan kasus penyalahgunaan AI memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif. Hukum harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari penggunaan teknologi yang semakin canggih ini, sembari tetap mendorong inovasi dan kemajuan.

## Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Definisi kedudukan hukum adalah konsep fundamental dalam sistem hukum yang merujuk pada posisi, peran, dan hak-hak yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau entitas lain di dalam kerangka hukum tertentu. Kedudukan hukum menentukan bagaimana hukum berlaku terhadap subjek hukum dan bagaimana subjek hukum berinteraksi dengan sistem hukum secara keseluruhan.

Definisi Kedudukan Hukum Kedudukan hukum atau "legal standing" adalah posisi atau status yang dimiliki oleh seseorang atau entitas dalam sistem hukum yang memberikan hak dan kewajiban tertentu. Kedudukan ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses hukum, seperti mengajukan gugatan atau pembelaan di pengadilan. Kedudukan Hukum Individu Setiap individu memiliki kedudukan hukum yang melekat sejak lahir. Kedudukan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Individu juga memiliki kewajiban hukum seperti membayar pajak dan mematuhi hukum negara.

Kedudukan Hukum Perusahaan Perusahaan sebagai entitas hukum memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan mereka untuk melakukan kontrak, memiliki aset, dan mengajukan gugatan. Perusahaan juga memiliki kewajiban hukum seperti mematuhi peraturan perusahaan, pajak, dan standar operasi. Kedudukan Hukum Pemerintah, Pemerintah memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari individu dan perusahaan. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan penegak hukum serta memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak warganya, dan mengelola sumber daya negara.

Hak dan Kewajiban, Kedudukan hukum memberikan hak-hak tertentu kepada pemiliknya, seperti hak untuk diperlakukan secara adil di pengadilan, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh kompensasi. Di sisi lain, kedudukan hukum juga menetapkan kewajiban seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, memenuhi kontrak, dan membayar pajak. Perubahan Kedudukan Hukum, Kedudukan hukum dapat berubah berdasarkan peristiwa atau tindakan tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi dewasa memperoleh hak-hak baru dan kewajiban baru. Demikian pula, sebuah perusahaan yang bangkrut kehilangan beberapa haknya dan mendapatkan kewajiban baru untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Kedudukan Hukum dalam Proses Pengadilan, Dalam konteks litigasi, kedudukan hukum menentukan apakah seorang pihak berhak untuk mengajukan gugatan atau membela diri di pengadilan. Tanpa kedudukan hukum yang sah, pengadilan dapat menolak untuk memproses suatu kasus. Kedudukan Hukum Internasional, Dalam hukum internasional, kedudukan hukum negara dan organisasi internasional juga diatur. Negara-negara memiliki hak kedaulatan, hak untuk bergabung dengan organisasi internasional, dan kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional.

Pengakuan Kedudukan Hukum, Pengakuan kedudukan hukum oleh pihak ketiga, termasuk lembaga pemerintah dan institusi hukum, adalah penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan hukum tersebut diakui dan dihormati. Tanpa pengakuan ini, pelaksanaan hak-hak dan kewajiban hukum dapat terhambat. Implikasi Kedudukan Hukum, Pemahaman yang jelas tentang kedudukan hukum penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan benar. Hal ini juga penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum yang efektif harus mampu mengidentifikasi, mengatur, dan melindungi kedudukan hukum dari semua subjek hukum yang ada di bawah yurisdiksinya.

Dalam kesimpulannya, kedudukan hukum adalah elemen kunci dalam sistem hukum yang memberikan struktur dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh berbagai subjek hukum. Memahami dan mengakui kedudukan hukum ini sangat penting untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.